



MUNAZAR, FRAKSI PARTAI GOLKAR

Relaksasi Pajak Hotel Perlu Direspons Lebih Bijaksana



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Yogya tak hanya dikenal karena budayanya yang terus hidup, tetapi juga warganya yang menggantungkan harapan pada denyut ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir ini misalnya, sektor perhotelan menjadi salah satu ujung tombak penerimaan daerah. Tetapi kini, sektor itu tengah berada di persimpangan, antara upaya bertahan dan kewajiban fiskal yang mesti tetap berjalan.

Data terakhir dari PHRI DIY menunjukkan okupansi rata-rata hotel di DIY sepanjang kuartal pertama 2025 hanya sekitar 40 persen. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada keberlangsungan tenaga kerja. Namun dibalik semua itu, ada satu hal yang tak boleh luput, pajak hotel masih menjadi salah satu tulang punggung PAD Kota Yogya. Pada 2024 saja, pemasukan dari sektor ini cukup fantastis menyumbang lebih dari Rp 168 M, seperempat dari total PAD.

Pemintaan relaksasi pajak tentu patut didengarkan. Namun permintaan itu harus direspons dalam konteks yang lebih luas, siapa pelaku usaha yang paling terdampak, yang patuh, dan yang belum menjalankan kewajibannya. Tercatat, masih ada tunggakan pajak hotel Rp 16,7 M. Belum termasuk potensi penerimaan dan pengurangan yang belum berizin dan tak masuk wajib pajak. Dalam konteks inilah kebijaksanaan pemerintah mesti dikedepankan.

Idealnya pemberian keringanan semestinya dilakukan secara selektif. Hotel-hotel yang secara nyata mengalami penurunan okupansi dan memiliki rekam jejak kepatuhan pajak yang baik bisa diprioritaskan. Bukan sekadar diberi keringanan, melainkan dirangkul sebagai mitra dalam pemulihan. Namun bagi pelaku usaha yang selama ini abai, bahkan tidak tercatat sebagai pembayar pajak, pemerintah perlu tegas terhadap hal ini.

Kita perlu jujur bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan insentif. Ada saatnya pemerintah hadir sebagai fasilitator, namun juga ada saatnya ia harus berdiri untuk menjaga kepentingan lebih luas. Kota ini membutuhkan PAD yang sehat. Bukan hanya dalam artian nominal tetapi bagaimana dikumpulkan dengan cara adil, transparan, dan berpihak pada kemasyarakatan bersama. Maka selain soal keringanan, upgrade data wajib pajak, penerbitan penghapusan ilegal, dan digitalisasi pelaporan pajak harus segera disebut. Jangan sampai energi habis hanya di hilir, sementara hulu dibiarkan bocor.

Dalam pandangan legislatif, relaksasi yang terukur dan bijak justru langkah ideal. Namun semua harus berbasis data termasuk komitmen yang jelas dari pelaku usaha. Kalau perlu, insentif dikaitkan langsung dengan kontribusi sosial, menekan PHK, bekerja sama dengan UMKM, atau mendukung pelatihan untuk calon tenaga kerja.

Saya kira jika semua pihak berjalan dengan niat yang baik, tidak mustahil kebijakan pajak ini justru menjadi awal dari penataan yang lebih besar nantinya. Bukan hanya demi anggaran, tapi demi wajah kota yang makin tertib dan sejahtera. **(Dhi)-f**



KR-Istimewa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005